

HUBUNGAN KEPEMILIKAN MEDIA 1998-2010 TERHADAP PARTAI POLITIK

Suyanto

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Hubungan sistem media dan sistem politik dalam bingkai sistem komunikasi politik dilakukan dengan keyakinan bahwa komunikasi politik mempengaruhi proses produksi informasi politik dalam bentuk berita. Sistem komunikasi politik yang menunjukkan adanya interaksi antara elemen-elemen komunikasi politik yang digerakkan oleh sistem di dalamnya, seperti polisi, fungsi dan tujuan.

Dalam demokrasi modern, komunikasi antara ahli-ahli politik dan masyarakat sukar dilakukan secara tatap muka. Oleh kerana itu, komunikasi politik dilakukan dengan media massa atau disebut mediated politics (Bennet dan Entman, 2001). Selanjutnya media tidak lagi menjadi sarana komunikasi sahaja tetapi sudah menjadi deliberasi politik di mana masyarakat massa dapat ikut serta secara aktif karena kemajuan teknologi dan semakin independen ekonomi media maka campur tangan negara berkurang dengan sendirinya

Kata Kunci : Politik Media dan Kontrol Media

PENDAHULUAN

Perkembangan surat kabar di Indonesia sebagai salah satu perkembangan akhbar kompleks yang dipengaruhi oleh sistem politik Indonesia. Perkembangan sistem akhbar Indonesia terbagi menjadi beberapa periode iaitu Orde Lama (1957-1965), Orde Baru (1965-1998) dan Orde Reformasi (1998-sekarang).

Presiden pertama Indonesia Soekarno memimpin bangsa Indonesia pada tahun 1945-1965 yang disebut sebagai Orde Lama. Presiden Soekarno sudah menerapkan kebebasan pers semenjak beliau dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 17 Agustus 1945. Soekarno memanfaatkan pers Indonesia sebagai alat mobilisasi massa untuk tujuan tertentu. Semasa Orde Lama ini, surat khabar Indonesia mengalami perubahan dalam hal teknis, seperti mulai diberlakukannya lesen penerbitan pers. Namun demikian, keadaan ini tidak berlangsung lama kerana konflik politik yang terjadi di daerah menyebabkan Presiden Soekarno merubah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Impak dari perubahan sistem politik di Indonesia menyebabkan sistem pers

di Indonesia juga mengalami perubahan dengan banyak pers yang diberikan peringatan keras untuk penerbitan pers oleh Soekarno (Suwirta, 2008)

Namun pada tahun 1965 terjadi penyerahan kekuasaan tertinggi negara oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto. Semenjak kepemimpinan Soeharto seluruh penerbitan pers yang dianggap pers komunis dilarang terbit oleh Soeharto. Transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Brigadir Jeneral Soeharto (1965-1967). Semenjak itu, Negara Indonesia dipimpin oleh Panglima TNI Soeharto hingga diadakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1967.

Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia Maret 1968 bermula babak baru yang dikenal sebagai kelahiran Orde Baru. Pemerintahan Soeharto mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan kepemimpinannya dan kekuasaannya dalam menyusun kembali kehidupan ekonomi, politik sosial, budaya, dan Pertahanan Keamanan (Hankam). Secara kualitatif langkah-langkah perubahan struktur yang dijalankan oleh Pemerintahan Soeharto berupa penyederhanaan struktur partai politik yang ada. Usaha ini lebih dahulu dilakukan melalui pendekatan persuasif, kemudian dilakukan melalui pendekatan judicial formal, yaitu dengan menyusun Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Anom, 2006)

Pemerintahan Soeharto dalam melaksanakan kekuasaannya menggunakan sasaran strategi yang dirumuskan sebagai garis kerja dalam mengukuhkan Orde Baru yaitu: mengukuhkan lembaga negara; melakukan usaha-usaha mencegah lawan-lawan politik dalam negara; membentuk lembaga setiap kementerian dan mencegah kesetiaan ganda; meningkatkan penyelarasan antara lembaga pemerintahan; mentertibkan tatakerja pemerintahan; mempersiapkan pengamananpilihan raya; penertiban politik luar negara sehingga benar-benar mengabdikan pada kepentingan nasional dan negara; membentuk kerjasama dengan media masa yang benar-benar mendukung Orde Baru untuk memperjuangkan asas negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (*basic law*) dan membentuk Pusat Informasi yang menentukan garis-garis kawalan, dasar dan peraturan di bidang media massa; (Anom, 2006).

Pers Indonesia era reformasi tahun 1998-2010 bersaing dalam mencari keuntungan yang berlipat ganda dari iklan dan pelanggan. Fenomena ini kemudian melahirkan gejala kelompok kepemilikan media raksasa, seperti Gramedia Grup, Sinar Kasih Grup, Pos Kota Grup, Presindo Grup, dan Jawa Pos Grup. Fenomena media massa pada era reformasi adalah pers yang telah menjadi industri ditengah kebebasan politik. Ratusan surat khabar dan tabloid terbit tanpa harus memakai SIUPP. Mekanisme pasar bebas sukar dihindari lagi dalam industri pers sekaligus mengakhiri kontrol penguasa terhadap pers di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Media

Menurut Athey (1982) sistem adalah satu set komponen atau bahagian-bahagian yang boleh dilihat sebagai kerjasama bagi mencapai tujuan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, menurut Cleland dan King (1972), satu-satu sistem itu mampu menunjukkan struktur dan bagian-bagian (subsistem) yang di dalamnya terdapat bagian-bagian kecil (sub-subsistem) yang menjelaskan keseluruhan sistem. Selain daripada itu, sistem mempunyai sifat-sifat yang berkomponen, saling berkaitan dan bergantung, serta menunjukkan satu struktur, yang seterusnya membentuk satu set sistem keseluruhan, dan ia juga mempunyai had yang membezakan satu-satu sistem itu dengan persekitarannya (Asiah Sarji 1996).

Sistem media merupakan bahagian atau subsistem dari sistem komunikasi. Sedangkan komunikasi itu sendiri merupakan subsistem dari sistem sosial. Oleh karena itu, untuk mengetahui sistem media di sesuatu negara, perlu difahami lebih dahulu bentuk sistem sosial dan pemerintahan, tempat sistem media itu berada dan berfungsi (Rachmadi: 1990).

Ekonomi Politik Media

Pendekatan politik ekonomi media berpendapat bahawa kandungan media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud kandungan media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang boleh atau tidak boleh ditampilkan dalam pemberitaan, serta ke mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak ditujukan (Sudibyo, 2001:2). Dalam pendekatan politik ekonomi media, kepemilikan media (*media ownership*) mempunyai erti penting untuk melihat peranan, ideologi, kandungan media dan efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat.

Struktur Kepemilikan Media

Dalam ekonomi politik media, kepemilikan media (*media ownership*) mempunyai erti penting untuk melihat peranan, ideologi, kandungan media dan efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat. Menurut Giddens, dalam Werner Meier, para pemilik media merupakan pihak yang kuat yang belum dapat dikalahkan dalam demokrasi. Golding dan Murdock melihat adanya hubungan erat antara pemilik media dengankawalan media sebagai sesebuah hubungan tidak langsung. Bahkan pemilik media, menurut Meier, dapat memainkan peranan yang signifikan dalam melakukan sesuatu keadaan yang sah terhadap

ketidaksetaraan pendapatan (*wealth*), kekuasaan (*power*) dan *privilege*
(Garnham, 2009)

Ekonomi politik media secara umum digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem ekonomi, sistem politik dan sistem komunikasi dalam struktur kapitalisme global. Teori ini fokus pada hubungan antara struktur ekonomi, dinamika industri media, dan ideologi media (yang pada akhirnya tergambar dalam kandungan media tersebut). Media massa adalah salah satu bagian dalam sistem ekonomi dan sistem politik. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dan ideologi memiliki pengaruh besar dalam penentuan isi media. Perbezaan kandungan media antara satu dengan yang lainnya bergantung pada kepemilikan dan modal yang dimiliki (dalam Curran dan Gurevitch: 1991)

Kontrol Media

Ada pelbagai sistem media di dunia. Salah satu cara sederhana untuk membagi pelbagai sistem media itu adalah dengan melihat pada dua aspeknya, yaitu: (1) kepemilikan; dan (2) kawalan. Kepemilikan boleh beragam, mulai dari kepemilikan swasta sampai kepemilikan publik. Kepemilikan publik (*public ownership*) biasanya diertikan sebagai bentuk kepemilikan pemerintah. Sedangkan kontrol, boleh dari yang bersifat terpusat (*centralized*) sampai yang terdesentralisasi atau disebut juga dengan kata lain yaitu (*decentralized*) Di banyak negara, terdapat sistem media campuran di mana sebahagian sistem penyiaran dimiliki oleh pemerintah, dan sebahagian lainnya oleh kepentingan swasta. Di beberapa negara, media cetak dan media siarnya boleh berada di bawah bentuk kepemilikan yang berbeda.

METODE

Bogdan dan Taylor mendefinisikan kajian kualitatif sebagai prosedur penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selari dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kajian kualitatif adalah kajian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik. (Moleong, 2005;5).

Subjek penelitian ini adalah struktur kepemilikan media di Indonesia era reformasi 1998-2010. Sedangkan objektif penelitian ini maka data-data asas yang dirasakan patut diselidiki untuk memahami sistem media era reformasi di Indonesia tahun 1998-2010 dan menyelidiki struktur kepemilikan media dan

hubungannya dengan parti-parti politik, politik media terhadap sistem media dan bentuk-bentuk kontrol terhadap institusi media.

Ada pun pengutipan data dilakukan dengan dokumen-dokumen dan temu bual secara mendalam dengan ahli politik, ahli media, pemilik media, pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informasi), Persatuan Serikat Penerbit Seluruh Indonesia (SPSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers.

Ada beberapa manfaat data primer, yaitu:

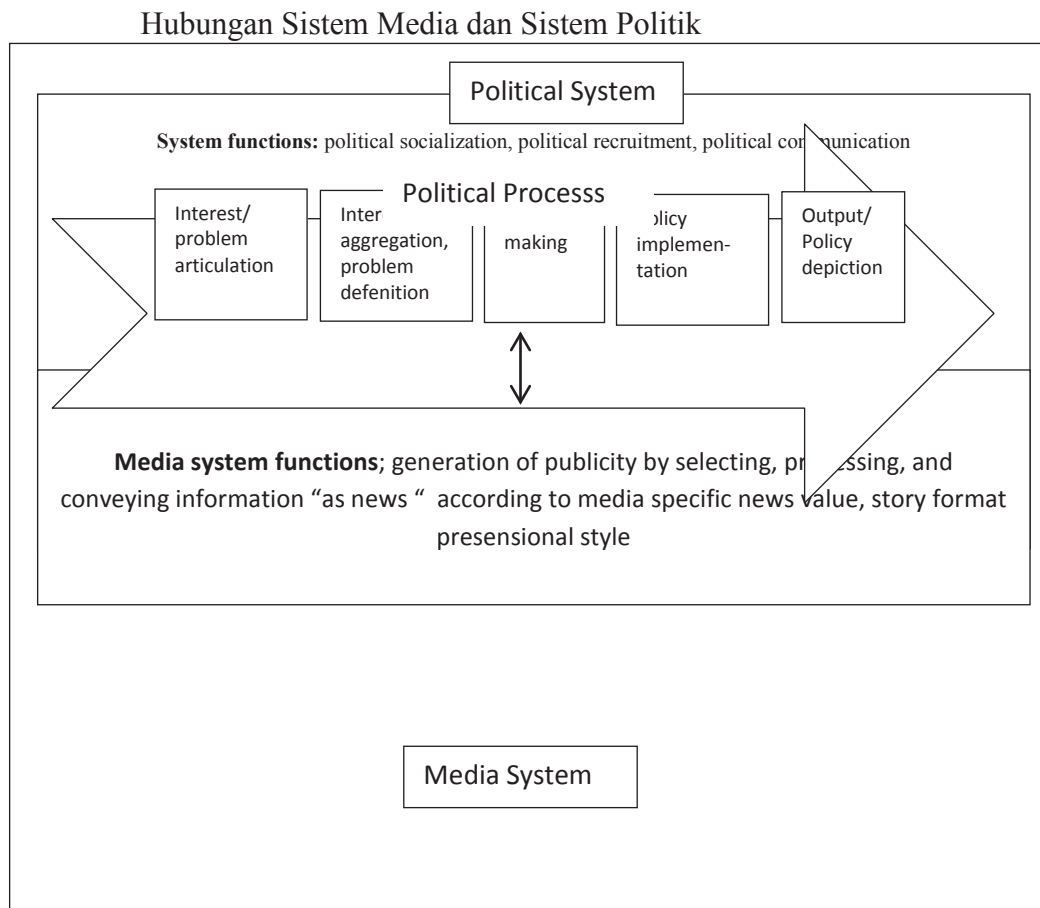
- “Data primer langsung bersangkutan dengan keperluan penyelidikan atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan penyelidikan.
- Tidak ada resiko *out of date* kerana baru dikumpulkan setelah projek penyelidikan dirumuskan.
- Semua pekerjaan pengumpulan data statistik dipegang sendiri oleh pengkaji.
- Pengkaji mengetahui kualitas dari metode-metode yang dipakainya, kerana ialah yang mengaturnya sejak awal penyelidikan.”(Marzuki, 2002)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Sistem Media dengan Sistem Politik di Indonesia era Reformasi

Untuk memahami hubungan media dan politik adalah teori sistem Niklas Luhman. Luhman melihat bahawa sistem sebagai *self referencing, contingent*, dan selalu kurang sempurna berbanding lingkungannya (Ritzer dan Goodman, 2004). Sebuah sistem didefinisikan sebagai batasan antara sistem sendiri dan lingkungannya, perbezaan secara kompleksitas yang membuat antara satu sistem dengan sistem lainnya.

Hubungan sistem media dengan sistem politik dijelaskan dalam bingkai proses input-output sistem politik yang merupakan bilik di mana keduanya bertemu (Esser dan Pfetsch, 2004). Dalam setiap tahap proses sistem politik mulai dari artikulasi kepentingan (*interest articulation*) hingga dikeluarkannya polisi (*policy depiction*), media memiliki peranan penting. Gurevitch dan Blumler (1989) menjelaskan hubungan ini dengan sistem politik dengan komunikasi politik. Artinya, sudah jelas bahawa semua tindakan lembaga politik memiliki dimensi komunikasi, mulai dari kekuasaan, wewenang, artikulasi kepentingan, kepatuhan, dan lainnya



dengan media yang mempunyai hubungan politik. Bahkan media diyakini memiliki dampak tertentu pada sistem politik. Oleh karena itulah, seperti ditegaskan McQuail (dalam Scheufele, 1999) bahwa “ *the entire study of mass communication is based on the premise that the media have significant effects* ” pada politik. Peranan komunikasi dari media dalam setiap tahapan proses politik terbentuk dalam bentuk berita. Berita sebagai wujud peranan media tersebut tidak selalu menyikapi proses politik secara bersama. Artinya, media tidak selalu menerima dan mendukung tindakan politik yang dilakukan oleh para aktor dan lembaga politik

Kontrol Media di Indonesia

Negara-negara yang telah meninggalkan filsafat komunis biasanya berpindah kategori, dari Model B menjadi Model A dan C. Organisasi-organisasi media yang

dioperasikan oleh negara mulai kehilangan kawalannya, sementara saluran bagi media swasta sudah diberikan permitnya. Saluran media individual kemudian diberi jauh lebih banyak kebebasan untuk melakukan kritikan kepada pemerintah.

Dengan semakin dominannya kepemilikan media swasta, serta makin berkurangnya kawalan dari pemerintah, kawalan ketat terhadap pemberitaan media kemudian bukan tak mungkin justru dilakukan oleh pemilik media sendiri. Hal ini kerana pemilik media bukanlah orang yang dalam posisi neutral terhadap kekuasaan, tetapi justru pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan itu, atau bahkan ia menjadi bahagian dari kekuasaan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, pemilik media biasanya adalah pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Kedekatan itu perlu demi kelancaran bisnisnya. Namun, boleh juga terjadi, pemilik media sendiri adalah tokoh yang memiliki ambisi-ambisi politik. Maka, kepemilikannya terhadap sejumlah media, ia manfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Pada akhirnya, dengan memiliki kekuasaan politik, ia berharap boleh semakin mengembangkan bisnisnya. Jadi, kekuasaan politik dan penguasaan modal (serta media) terbukti berhubung kait satu sama lain, dan saling memerlukan

SIMPULAN

Dalam kesimpulan kajian, pengkaji membahagikan dalam tiga kesimpulan asas, *pertama*; hubungan sistem media dan sistem politik di Indonesia merupakan hubungan yang sangat kuat dan berhubung kait sehingga di dalam sistem media di Indonesia, media adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di Indonesia. media di Indonesia mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan lingkungan politik dengan sistem politik Indonesia. Media massa sebagai ejen pemerintah dan masyarakat dalam memberikan informasi kepada khalayaknya. Media di Indonesia sebagai instrumen dan menyuarakan aspirasi rakyat dan sebagai benda yang kontrol pemerintah.

Kedua, bentuk-bentuk kontrol terhadap institusi media di Indonesia dilakukan oleh pemilik modal, pemerintah dan masyarakat. Semua bentuk kontrol terhadap media di Indonesia sangat diperlukan kerana media perlu ada kontrol dari pelbagai elemen yang ada di negara Indonesia termasuk masyarakat. Dengan kebebasan pers di Indonesia, kontrol yang paling penting dilakukan oleh masyarakat. Mengapa demikian, kerana kontrol yang dilakukan oleh pemilik modal jelas untuk kepentingan ekonomi dan politik, dan kawalan yang dilakukan oleh pemerintah sangat jelas untuk kepentingan politik. Namun berbeda kontrol yang dilakukan oleh masyarakat adalah kontrol sosial, politik dan kepentingan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Noval (1999). *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia*.
- Anom Erman. (2006). *Dasar dan sistem akhbar dalam era kepemimpinan Soeharto 1966-1998*. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- Anuar Mustafa K. (1990) *The Malaysian 1990 General Election: The Role of The BN Mass Media*. *Kajian Malaysia* 8 (2): 82-102.
- Ardianto, Elvinaro & Erdinaya, Lukiat Komala (2004). *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Simbiosis Rekatama: Bandung.
- Arifin, Anwar (1992) *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila : Suatu Kajian mengenai Pers Pancasila*. Jakarta : Yayasan Media Sejahtera.
- Asiah Sarji. (1996) *Pengaruh persekitaran politik dan sosio budaya sistem penyiaran Malaysia dalam perkembangan penyiaran radio di Malaya dari tahun 1920-1959*. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- Chesney, Robert Mc (1998) *Konglomerasi Media Massa dan Ancaman Terhadap Demokrasi*, Andi Achdian (terj), Jakarta : hlm.29.
- Curran, James, (2000) *Rethinking Media and Democracy*, Oxford University Press, New York.
- Darmawan Ikhsan (2013) *Analisa Sistem Politik Indonesia*. Alfabeta. Bandung
- Dhakidae Daniel (2003) *Cendiakiawan dan Kekuasaan; Dalam Negara Orde Baru*. Gramedia. Jakarta
- Downing, John, Ali Mohammadi & Annabele Srebery-Mohammadi (1990) (Eds.), *Questioning The Media: A Critical Introdustion*, Sage Publication, Newbury Park, California,
- Garnham, N., *Contribution to a Political Economy of Mass Communication*, *Media, Culture and Society* 1(2): 123.

- Gomez, E.T, (2004) *Politics of the media business: The press under Mahathir. In Reflections: The Mahathir years*, edited by Bridget Welsh, 475-85. Washington DC: Johns Hopkins University.
- Gulo, W (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasana Indonesia: Jakarta.
- Hall, Stuart (1997) (Ed.), *Representation: Cultural Representations dan Signifying Practices*, Sage Publications, London.
- Hasan, Erliana (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Rafika Aditama: Bandung.
- Hill T David (2011) *Pers di Masa Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta
- Hermin Indah Wahyuni (2007), *Politik Media dan Transisi Politik dari Kontrol Negara menuju Self Regulation Mecanism*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4 NO. 1
- Hidayat, Dedy. N (2001) Pengantar, dalam Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS
- Kencana, Syafie Inu (2006) *Sistem Politik Indonesia*, refika aditama, Bandung.
- Koike, Makato, Globalizing Media and Local Society in Indonesia, makalah dalam workshop 1314 September 2002 (Leiden, Nederland, dalam IIAS News, 2002
- Krishna Sen, dan David T. Hill. (2001) *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- Kriyantono, Rachmat (2006) *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Latif, Yudi dan Idi Subandi Ibrahim, (1996) *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Mizan, Bandung.
- Littlejohn, Stephen W., *Theories of Human Communication*, Wardsworth, Belmont, California, 1996.
- Michael Gurevitch, *Mass Media And Society*, Third Edition, Arnold London and Oxford University Press, New York.
- Mohd Safar, Hasim. 1996. *Akhbar dan kuasa: Perkembangan sistem akhbar di Malaysia sejak 1806*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

- Moleong, Lexy J. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mosco, Vincent (1996) *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*, Sage, London.
- Rahayu, *Analisis Dampak Pergeseran Karakteristik Industri Pers pada Strategi Syarikat dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*, dalam Jurnal Komunikasi, Vol.V/Oktobre 2000, hlm.38.
- Safar Mohd, Hasim (1996). *Akhbar dan Kuasa: Perkembangan Sistem Akhbar di Malaysia sejak 1806 The Press and Power: The Development of The Press System in Malaysia since 1806*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press
- Schram, Wilbur dan Peterson. (1986) *Empat Teori Pers*. Jakarta: PT. Intermedia
- Severin, Werner J. dan James W. Tankard, JR. (2005) *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Edisi 5. Jakarta: Prenada Media.
- Shafer, R.J.(1974). *A guide to historical method*. Illinois: The Dorsey Press.
- Shoemaker, Pamela J. & Stephen D. Reese (1996) *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, Longman.
- Siti Aminah (2005), *Politik Media, Demokrasi dan Media Politik*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 3 No. 2 hal 34-37
- Smythe, Dallas, *Communication: Blindspot of Western Marxism*, Canadian Journal of Political and Social Theory, Volume 1, Number 3,1977,hlm.1. [3] Op.cit, hlm.63.
- Alex (2001) *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*. Humaniora Utama Press. Bandung
- Storey, John (ed.), *Cultural Theory and Popular Culture*, Harvester Wheatsheaf,
- Sudibyo Agus, (2013) *50 Tanya Jawab tentang Pers*. Gramedia. Jakarta
- Sugiyono. (2002) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Swakarya: Jakarta.
-

- Suwirta Andi, (2008) *Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: antara Kebebasan dan tanggung Jawab Nasional*. Jurnal Sosiohumanika Vol 1(2)
- Syahputra Iswandi (2013) *Rezim Media*. Gramedia. Jakarta
- Taufik L (1977) *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Triyincoco. Jakarta
- Wang, Lay Kim (1998) *Malaysia: Ownership as Control*. *Development Dialogue* 2: 61-83.
- Whyte, Martin King. (1992) *Urban China : A Civil Society*. dalam Arthur Rosenbaum. *State and Society in China*. Colorado : Westview Press Publisher.
- Williams, R. (1973) *Base and Superstructure*, New Left Review,
- Wiryanto. (2004) *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Zaharom Nain (1994). '*Commercialization And Control In A 'Caring Society': Malaysian Media 'Towards 2020'*'. SOJOURN. Vol. 9, No. 2: 178199.
- Zaller John (1999), *A Theory of Media Politics: How The Interests of politicians, Journalists and Citizen Shape The News, Paper*. University of Michigan